

**DINAMIKA NEGOSIASI INDONESIA-EU CEPA
DALAM KONTEKS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

SALSABILA FAKHIRAH

07041181924039

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"Dinamika Negosiasi Indonesia-EU CEPA dalam Konteks Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah"**

Skripsi

Oleh:

**Salsabila Fakhriah
07041181924039**

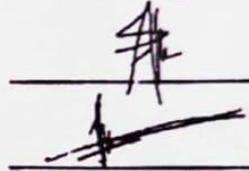
**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Juli 2023**

Pembimbing :

**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.
NIP. 1991104092018032001**

**Khairunnas, S.IP., M. IPol.
NIDN. 0111059403**

Tanda Tangan

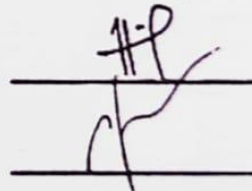


Penguji :

**Indra Tansyah, S.IP., M.Hub.Int.
NIDN. 0025058808**

**Abdul Halim, S.IP., MA.
NIP. 199310082020121020**

Tanda Tangan



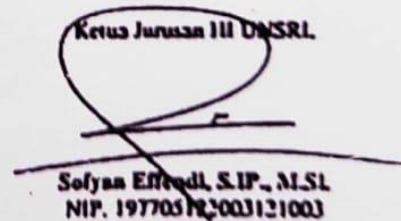
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI.



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004**

Ketua Jurusan III UNSRI.



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705182003121003**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“Dinamika Negosiasi Indonesia-EU CEPA dalam Konteks
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”**

Skripsi

Disusun oleh:

Salsabila Fakhirah

07041181924039

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 4 Agustus 2023

Pembimbing I

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.


NIP. 199104092018032001

Pembimbing II

Khairunnas, S.IP., MA.

NIDN. 0011059403

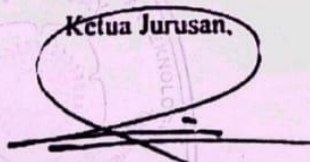
Tanda Tangan





Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,

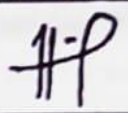
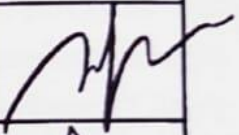




Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

U

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Salsabila Fakhirah
Nim : 07041181924039
Judul Skripsi : Dinamika Negosiasi Indonesia-EU CEPA dalam Konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tanggal Sidang Skripsi : 25 Juli 2023

No	Dosen/NIP	Revisi	Tanda Tangan
1	Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int. /NIDN. 0025058808 <i>(Penguji 1)</i>	-Saran untuk pemerintah	
2	Abdul Halim, S.IP., MA/ NIP. 199310082020121020 <i>(Penguji 2)</i>	-Perbaiki <i>zero-sum perspective</i> -Beri solusi untuk BATNA	
3	Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA/ NIP. 199104092018032001 <i>(Pembimbing 1)</i>	-Perbaiki penyajian data	
4	Khairunnas, S.IP., MA/ NIDN. 0011059403 <i>(Pembimbing 2)</i>	-Perbaiki paragraf dan daftar pustaka menjadi rata kiri-kanan -Perbaiki penyajian data wawancara -Perbaiki penyajian data lainnya -Komparasi data wawancara dengan data lainnya -Triangulasi sumber	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Fakhirah

NIM : 07041181924039

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Dinamika Negosiasi Indonesia-EU CEPA dalam Konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Salsabila Fakhirah

NIM. 07041181924039

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Bapak Salmon Hidayat dan Ibu Eti Adriani, yang yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti. Terima kasih atas segala dukungan, cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, dan doa yang diberikan, semoga Tuhan menjaga dan menyayangi serta memberi imbalan surga kepada keduanya kelak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Dinamika Negosiasi Indonesia-EU CEPA dalam Konteks Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”**. Penulisan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu rasa hormat sebesar-besarnya serta terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA. dan Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.Pol. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, saran, dan motivasi selama peneliti dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub. Int. dan Bapak Abdul Halim, S.IP., MA. selaku Penguji I dan Penguji II dalam Sidang Akhir Skripsi peneliti yang banyak memberikan saran dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini;
6. Mba Sisca Ari Budi selaku admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
7. Bapak Theodore Sutarto S.E., M.E., dan Mas Rahmat Fitriadi Herman, S.E., M.S.M. selaku pembimbing lapangan selama peneliti menjalani program magang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam proses pengumpulan data dan informasi untuk skripsi ini.

8. Tersayang dan merupakan faktor terbesar ketegaran peneliti setelah Allah SWT, dan Rasulullah Muhammad SAW, peneliti sampaikan tak terkira syukur dan terima kasih kepada Ayahanda Salmon Hidayat dan Ibunda Eti Adriani. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan doa yang dipanjatkan, hingga peneliti tak henti bersyukur telah dilahirkan di keluarga ini. Semoga Allah SWT menghadiahkan surga untuk Ayah dan Ibu kelak.
9. Abang Ade Hermawan dan Abang Fahmi Khamdani yang selalu membahagiakan, melindungi dan mendukung peneliti sejak kecil. Tanpa pengorbanannya tidak mungkin peneliti mampu berada di tahap ini.
10. Yang tercinta: Himawari Tutulwati, Gendot, dan Anak. rasa rindu dan janji peneliti kepada mereka adalah penguat bagi peneliti dalam menghadapi setiap tantangan selama penyelesaian skripsi ini.
11. *Miss* Sari Mutiara Aisyah, bukan sebagai dosen pembimbing, namun sebagai *coach*, dosen, ibu, dan perempuan yang luar biasa. Berkat beliau peneliti berkesempatan mendapat pengalaman berharga semasa berkuliah.
12. Kakak tak sedarah Frida Maghfira, yang telah mengiringi, menyemangati, dan banyak peneliti andalkan selama masa-masa sulit.
13. Sahabat-sahabat tercinta semasa kuliah, Amalia, Fani, Rahma, Reni, dan Kak Ncun yang selalu menemani dan menghibur peneliti melalui suka-duka, serta memotivasi peneliti agar bisa lulus bersama-sama. Semoga tetap terjaga silaturrahim hingga masa tua kelak.
14. Keluarga *Sriwijaya Debating Society (SDS)*, adik-adik, serta rekan-rekan *advisor*, terima kasih telah membuat masa kuliah peneliti semakin berarti.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis dinamika negosiasi *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)* dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang hingga Juli 2023 sudah berlangsung 15 putaran selama 8 tahun. Penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan LKPP sebagai *lead negotiator* Indonesia dalam IEU CEPA Bab PBJP, berdasarkan *principled negotiation theory* yang dikemukakan oleh Roger Fisher dan William Ury. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika negosiasi IEU CEPA pada Bab PBJP mengalami hambatan tawar-menawar posisi, persepsi *victory for one*, serta kekuasaan yang tidak seimbang antara Indonesia dan Uni Eropa, Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan: 1. Negosiasi Berbasis Kepentingan melalui *joint study, scoping paper, proposed draft text, dan SoD*, dimana kedua pihak masih cenderung melakukan *positional bargaining*; 2. Penciptaan Opsi-opsi Kreatif melalui penyusunan posisi berdasarkan kajian dan analisis, serta tetap bersedia mempertimbangkan keuntungan di bab lain meski mengalami hambatan *victory for one perspective*; 3. Penentuan Kriteria Objektif melibatkan penerapan standar kesesuaian opsi dengan regulasi dalam negeri, keselarasan lintas *chapter*, serta analisis dampak jangka panjang. Kriteria adil diterapkan setara untuk batang tubuh dan asas *reciprocal* pada bagian *annex*, serta dievaluasi secara *penta-helix*; 4. Alternatif Terbaik Jika Negosiasi Gagal tidak dapat dioperasionalkan sepenuhnya dalam penelitian ini, namun sebagai saran Indonesia dapat melakukan diversifikasi pasar dan mitra dagang, meningkatkan daya tawar melalui kerja sama regional, dan meningkatkan daya saing dan kualitas produk.

Kata kunci: Dinamika negosiasi, *I-EU CEPA*, Negosiasi berprinsip, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menyetujui,

Pembimbing I



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.

NIP. 199104092018032001

Pembimbing II



Khairunnas, S.IP., M.IPol.

NIDN. 0011059403

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The research aims to analyze the dynamics of the Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) negotiations in the context of Government Procurement of Goods/Services (GP) which have been ongoing for 15 rounds over 8 years until July 2023. The qualitative research was conducted using data collection techniques through observation and interviews with LKPP as Indonesia's lead negotiator in the IEU CEPA GP Chapter, based on the principled negotiation theory proposed by Roger Fisher and William Ury. The research findings indicate that the dynamics of the IEU CEPA negotiations in the GP Chapter face challenges of position bargaining, perceptions of victory for one, and imbalanced power between Indonesia and the European Union. To overcome these challenges, the following steps were taken: 1. Interest-Based Negotiation through joint study, scoping paper, proposed draft text, and SoD, where both parties still tend to engage in positional bargaining; 2. Creation of Creative Options through the development of positions based on studies and analysis, and remaining open to considering benefits in other chapters despite facing victory for one perspective challenges; 3. Determination of Objective Criteria involving the application of standards of suitability for options with domestic regulations, cross-chapter alignment, and long-term impact analysis. Fair criteria are applied equally to the main body and the reciprocal principle in the annex section, and evaluated using the penta-helix approach; 4. Best Alternative to a Negotiated Agreement could not be fully operationalized in this research, but as a suggestion, Indonesia can diversify markets and trading partners, enhance bargaining power through regional cooperation, and improve competitiveness and product quality.

Keywords: *Negotiation dynamics, I-EU CEPA, Principled negotiation, Government Procurement*

Approved by,

Advisor I



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.
NIP. 1991104092018032001

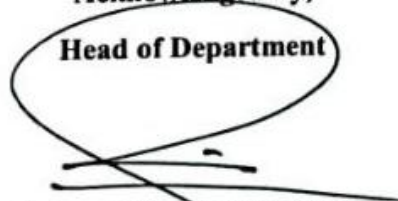
Advisor II



Khairunnas, S.IP., M.IPol.
NIDN. 0011059403

Acknowledged by,

Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERBAIKAN SIDANG KOMPREHENSIF	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kerangka Konseptual.....	18
2.3. Teori Negosiasi.....	18
2.3. Alur Pemikiran	26
2.4. Argumentasi Utama	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Desain Penelitian	28
3.2. Definisi Konsep	28
3.3. Fokus Penelitian	32
3.4. Unit Analisis.....	35
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7. Teknik Keabsahan Data	37

3.8. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	41
4.1. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Perdagangan Internasional .	41
4.2. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Indonesia.....	49
4.3. Hubungan Indonesia-Uni Eropa.....	54
4.4. IEU CEPA	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1. Fokus pada Kepentingan Bersama (<i>Interests</i>).....	71
5.2. Penciptaan Opsi Kreatif (<i>Options</i>).....	90
5.3. Penentuan Kriteria Objektif (<i>Criteria</i>).....	98
5.4. <i>Best Alternative to a Negotiated Agreement</i> (BATNA)	120
BAB VI PENUTUP	129
6.1. Kesimpulan	129
6.2. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	139
I. Identitas Informan.....	139
II. Wawancara dengan Negosiator IEU CEPA <i>on GP Chapter</i>	139
III. Dokumentasi Wawancara.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	32
Tabel 4. 1 Negara Pihak WTO GPA.....	44
Tabel 4. 2 Negara Observer WTO GPA	46
Tabel 4. 3 Seven World's Largest Economies	61
Tabel 4. 4 Perkembangan Perundingan IEU CEPA	68
Tabel 4. 5 Progres Lintas Chapter IEU CEPA 2019-2023.....	114
Tabel 5. 1 Kepentingan Indonesia dan Uni Eropa dalam IEU CEPA On GP Chapter	77
Tabel 5. 2 Peraturan Indonesia yang tidak sesuai dengan Prinsip Non- Diskriminasi IEU CEPA On GP Chapter.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	26
Gambar 4. 1 Perkembangan FDI dari EU ke Indonesia, 2010-2019	55
Gambar 4. 2 Persentase FDI Dalam perekonomian negara-negara di Asia (% terhadap PDB)	56
Gambar 4. 3 PDB (US\$ 2022) - Uni Eropa.....	60
Gambar 5. 1 Interest-based Negotiation of I-EU CEPA on GP Chapter	72
Gambar 5. 2: Proses Identifikasi kepentingan mendasar setiap pihak.....	73
Gambar 5. 3 Faktor Penentu Prioritas Kepentingan dalam Negosiasi IEU CEPA on GP Chapter	88
Gambar 5. 4 Penciptaan Opsi Kreatif pada IEU CEPA	90
Gambar 5. 5 Penentuan Kriteria Objektif dalam IEU CEPA on GP Chapter	99
Gambar 5. 6 Kriteria/Standar Mempertimbangkan Opsi-opsi ... Error! Bookmark not defined.	
Gambar 5. 7 Evaluasi Kriteria Secara Penta-Helix	106
Gambar 5. 8 Penciptaan Alternatif Terbaik Jika Negosiasi Tidak Disepakati....	121

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARISE+	: ASEAN Regional Integration Support from the EU
ASEAN	: Association of South-East Asian Nations
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATNA	: Best Alternative to a Negotiated Agreement
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMAD	: Bea Masuk Anti-Dumping
BUJKN	: Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CEPA	: Comprehensive Economic Partnership Agreement
Ditjen PPI	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
DNI	: Daftar Negatif Investasi
EEAS	: European External Action Service
EU GP	: European Union Government Procurement
FDI	: Foreign Direct Investment
FTA	: Free Trade Agreement
GDP	: Gross Domestic Product
GNB	: Gerakan Non-Blok
GP	: Government Procurement
GPA	: Government Procurement Agreement
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IA CEPA	: Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
ICA CEPA	: Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement
ICSID	: International Centre for Settlement of Investment Disputes
IEU CEPA	: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement
IG	: Indikator Geografis
IJEPA	: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
IMF	: International Monetary Fund
IUAE CEPA	: Indonesia-Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement
K/L/PD	: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
P3DN	: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

PBJ	: Pengadaan Barang Jasa
PBJP	: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDN	: Pengusaha Dalam Negeri
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
SDM	: Sumber Daya Manusia
SoD	: Summary of Discussion
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPS	: Sanitary and Phytosanitary
SWOT	: Strengths Weaknesses Opportunities and Threats
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
UE/EU	: Uni Eropa/European Union
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	: United Nations
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, dominasi produk impor dalam sektor-sektor industri di Indonesia menjadi sorotan utama. Misalnya, industri otomotif, elektronik, tekstil, dan peralatan industri menghadapi tantangan dominasi produk impor. Pada Juli 2022, pengeluaran pemerintah untuk belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih didominasi oleh produk impor, mencapai total Rp722,88 triliun, sementara belanja untuk produk dalam negeri hanya Rp180,72 triliun. Hal ini menjadi perhatian penting karena terdapat setidaknya 842 produk yang dapat menjadi substitusi dan tersedia melalui e-katalog. Fenomena dominasi barang impor dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pada impor, ketidakmampuan produksi domestik yang memadai, dan preferensi konsumen terhadap produk impor. (Agus, 2022).

Presiden menyatakan bahwa pengadaan barang melalui impor lebih mudah dan harga barang dapat lebih terjangkau. Namun, menurutnya, ada satu potensi yang hilang dalam kegiatan pengadaan melalui impor, yaitu peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa dapat menjadi strategi untuk membangun industri kecil terkait dengan barang tersebut. Selain itu, Indonesia saat ini berupaya aktif mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Diharapkan industri substitusi barang impor segera

dipersiapkan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor dan akhirnya mengurangi defisit yang terjadi. (Rusman, 2019).

Pemerintah Indonesia intensif meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tujuannya adalah mendorong masyarakat dan instansi pemerintah untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dalam proses pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan produksi dan kualitas barang dan jasa dalam industri nasional, sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Kebijakan P3DN juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar dan mengurangi ketergantungan pasar domestik pada produk impor. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. (Indonesia H. S., 2022).

Sejak awal tahun 2022, pemerintah berupaya keras meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi impor, terutama dalam belanja kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN. Pada tanggal 30 Maret 2022, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Indonesia H. S., 2022). Melalui Inpres tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi agar setidaknya 40 persen dari anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk mengadopsi produk UMKM dan Koperasi yang merupakan hasil produksi dalam negeri (PDN). Selain itu, minimal Rp400 triliun dari APBN dan APBD 2022

diarahkan untuk digunakan dalam PDN dengan memberikan prioritas pada produk UMKM (Agus, 2022).

Walaupun kebijakan tersebut berasal dari kebijakan domestik, namun implementasinya telah menciptakan dinamika dalam hubungan internasional, lantaran kebijakan tersebut menjadi panduan bagi Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat diamati dalam proses negosiasi dengan negara mitra yang beracuan pada prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam *Government Procurement Agreement (GPA)*, salah satunya Uni Eropa dalam proses perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA)*.

Praktik perdagangan internasional pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri diatur dalam *Government Procurement Agreement (GPA)*. GPA merupakan perjanjian plurilateral dalam kerangka WTO memberi arti bahwa tidak semua anggota WTO menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. GPA dibuat dengan tujuan menciptakan pengadaan yang terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif agar dapat mengoptimalkan persaingan di antara pemasok. Hal ini dikarenakan banyak pemerintah yang menggunakan pengadaan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan dalam negeri lainnya, seperti promosi sektor industri lokal tertentu atau kelompok sosial, sedangkan WTO menganggap pemberian perlakuan istimewa semacam ini mendiskriminasi pemasok asing karena berperan sebagai *trade barriers* di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (WTO, WTO and government procurement, 2023) Naskah perjanjian GPA menetapkan peraturan yang mensyaratkan kondisi persaingan yang terbuka, adil, dan transparan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ((WTO), 2023).

Indonesia sendiri merupakan *observer* untuk GPA sehingga bukan merupakan anggota dalam Perjanjian tersebut, namun tetap berpartisipasi dalam Komite Pengadaan Pemerintah sebagai Pengamat. Artinya, Indonesia tidak wajib mematuhi aturan non-diskriminasi dan *national treatment* yang diterapkan ((WTO), 2023). “Akan tetapi, pada realitanya, Indonesia kerap kali bermitra dengan negara-negara yang merupakan anggota GPA WTO sehingga dalam praktik negosiasi negara mitra yang merupakan pihak GPA WTO tetap menggunakan naskah GPA WTO sebagai basis perundingan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga proses perundingan terhambat. Hingga Februari 2023, Indonesia dalam proses perundingan dua *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan negara pihak GPA WTO, yakni IEU CEPA dan I-CA CEPA (R. Fitriadi, komunikasi pribadi, 18 Januari 2023).

Indonesia mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sedangkan mitranya yakni Uni Eropa mengacu pada naskah GPA, kerap kali menjadikan proses negosiasi terhambat (Syukri H. A., 2021). Naskah GPA WTO mengharapkan anggotanya menerapkan prinsip non diskriminasi dan tidak menerapkan persyaratan kewajiban pemenuhan TKDN, dimana TKDN terdapat jelas dalam regulasi Indonesia. Prinsip-prinsip perdagangan bebas ini sederhananya meminta semua negara memberlakukan warga negara asing dan negara sendiri secara sama, sehingga tidak peduli produk diproduksi domestik atau produksi asing juga tetap diperlakukan sama (Sood, 2012). Sepanjang proses perundingan, pihak Uni Eropa meminta Indonesia menyetujui prinsip non diskriminasi dan menolak bentuk-bentuk proteksionis Indonesia termasuk memberi insentif sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memberi insentif untuk pihak swasta

yang konsisten memakai produk dalam negeri, serta memberikan fasilitas berupa preferensi harga dan kemudahan administrasi seperti tercantum dalam Pasal 88 UU RI No. 3 Tahun 2014 (Indonesia K. P., 2016).

Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dalam bahasa Indonesia diartikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Berbeda dengan pakta FTA yang hanya bertujuan menghilangkan hambatan tarif, CEPA mencakup area kerja sama yang jauh lebih luas, dengan tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan, namun juga membahas masalah investasi, bantuan ekonomi, kerjasama teknologi dan energi terbarukan dan sebagainya sehingga bersifat komprehensif (Kemlu, 2023). Perundingan IEU CEPA didasari pada hasil studi pada tahun 2010 yakni kajian berjudul “*Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Toward a Comprehensive Economic Partnership Agreement*”.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa jika hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa direalisasikan dalam suatu perjanjian kemitraan yang komprehensif dan mencakup isu-isu terkini, maka potensinya sangat besar. Kemudian, pada 2012 Indonesia dan Uni Eropa mulai menentukan ruang lingkup dan kedalaman komitmen yang akan dirundingkan melalui *scoping paper*. Kemudian terjadi vakum selama 4 tahun lantaran dalam prosesnya diselingi pergantian pemerintahan, dan perundingan sepakat dihidupkan kembali dengan menyelesaikan *scoping paper* pada April 2016. Kedua pihak meyakini peluang kerjasama IEU CEPA akan dapat mendukung peningkatan ekonomi dan memenuhi kepentingan nasional bagi Indonesia dan Uni Eropa (EU, 2011). Setelah Juli 2016, kedua pihak berhasil meluncurkan *joint scoping paper*.

Salah satu ruang lingkup kesepakatan ini dalam *Government Procurement Chapter* adalah “*The Agreement should achieve improvements in market access on the basis of the principles of non - discrimination and national treatment. IEU*”. (Joint Scoping Paper for an EU – Indonesia Comprehensive Partnership Agreement). Artinya, IEU CEPA menargetkan peningkatan akses pasar berdasar prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) dan perlakuan nasional (*national treatment*), sehingga kedua pihak tidak diperbolehkan memberikan perlakuan berbeda termasuk dengan preferensi produk dalam negeri (Amalia & Syukri, 2020).

Manfaat yang diekspektasikan dari perjanjian ini adalah akses pasar yang lebih besar ke negara anggota UE agar dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa. Sejak disepakatinya *scoping paper* IEU CEPA hingga Februari 2023, telah diadakan negosiasi sebanyak tiga belas putaran. Sejauh ini, proses negosiasi masih terkendala di pembahasan prinsip non-diskriminasi tersebut. Masalahnya, dalam negosiasi terdapat prinsip usaha tunggal, atau biasa dikenal dengan “*nothing is agreed until everything is agreed*”, yang berarti semua chapter harus disepakati. Sebagai gambaran, apabila hampir semua masalah dalam bab (misalnya perdagangan barang, investasi, dan hak kekayaan intelektual) telah disepakati, namun jika ada satu masalah yang belum disepakati (misalnya pengadaan barang/jasa pemerintah), maka kesepakatan keseluruhan tidak dapat ditandatangani dan harus menunggu masalah yang tertunda untuk diselesaikan. Dalam hal ini, jika pengadaan barang/jasa pemerintah tidak disepakati, tidak akan ada IEU CEPA sama sekali. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti. Pasalnya, Uni Eropa telah menegaskan bahwa *Government Procurement Chapter* tidak akan

disepakati jika tidak ada akses pasar berdasarkan prinsip non-diskriminasi (Amalia & Syukri, 2020).

1.2. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan yang dijelaskan di atas, dapat dilihat ada permasalahan yang muncul dari fakta-fakta tersebut, penulis dapat merumuskan masalah:

“Bagaimana dinamika negosiasi IEU CEPA yang terjadi dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian dilakukan atas dasar tujuan:

Mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses negosiasi IEU CEPA dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada teori negosiasi internasional, menganalisis tentang dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, serta menjadi sumber referensi dan rujukan bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik dengan topik yang sama atau terkait di bidang hubungan internasional, perdagangan internasional, negosiasi, dan pengadaan barang jasa pemerintah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi negosiator *IEU CEPA on GP Chapter*, penelitian ini dapat membantu dalam memahami perspektif dan kepentingan kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi IEU CEPA terkait pengadaan barang jasa pemerintah, untuk meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- (LKPP), L. K. (2020). *Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: LKPP.
- (WTO), W. T. (2023, January 26). *Agreement on Government Procurement*. Retrieved from wto.org: https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus, R. (2022, Juli 12). *Geramnya Jokowi, Belanja Pemerintah Masih Dominan Impor*. Retrieved from bisnisindonesia.id: <https://bisnisindonesia.id/article/geramnya-jokowi-belanja-pemerintah-masih-dominan-impor>
- Ahmad, W. (2003, Juni 18). Market Access Negotiations in Non Agricultural Goods. *Presentation at WTO symposium*. Geneva : Program Coordinator SAARC Chamber of Commerce and Industry.
- Anggela, N. L. (2023, Juli 13). *Mendag Zulhas: Perundingan IEU-CEPA Baru Selesai 60 Persen*. Retrieved from ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230713/12/1674729/mendag-zulhas-perundingan-ieu-cepa-baru-selesai-60-persen>
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan : Metode Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arise+ Indonesia. (2021). *Memetik Keuntungan dari Perjanjian Ekonomi Transformatif: Studi mengenai Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Jakarta: CSIS.
- ARISE+ Indonesia. (2023, July 5). *Kerja Sama Uni Eropa dengan Indonesia*. Retrieved from ariseplus-indonesia.org: <https://ariseplus-indonesia.org/id/tentang/kerja-sama-uni-eropa-dengan-indonesia.html>
- Bachtiar, F. R. (2020). Peran Wto Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia). *RIR Review of International Relations 2020 40 Volume 2, Nomor 1*.
- BPSDM Kementerian PUPR. (2016, September 24). *BELAJAR E-PROCUREMENT DAN E-PURCHASING DI DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI MAKASSAR*. Retrieved from pu.go.id: <https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/belajar-eprocurement-dan-epurchasing-di-diklat-pengadaan-barang-dan-jasa-di-makassar>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave.
- Clayton, M. (2017, June 27). *Roger Fishem & William Ury: Principled Negotiation*. Retrieved from www.pocketbook.co.uk: <https://www.pocketbook.co.uk/blog/2017/06/27/roger-fisher-william-ury-principled-negotiation/>

- CNBC Indonesia. (2023, February 27). *3 Isu Kontroversial yang Bikin RI & Uni Eropa 'Perang' di WTO*. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230227133949-4-417282/3-isu-kontroversial-yang-bikin-ri-uni-eropa-perang-di-wto](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230227133949-4-417282/3-isu-kontroversial-yang-bikin-ri-uni-eropa-perang-di-wto)
- Commission, E. (2023). *Report of the 15 th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Yogyakarta: European Commission.
- Coplin, W. D. (1971). *Introduction to international politics;: A theoretical overview (Markham political science series)*. Markham Pub. Co.
- Damayanti, A. (2023, July 13). *Zulhas Beberkan Progres Perjanjian Dagang RI-Uni Eropa*. Retrieved from [finance.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6821385/zulhas-beberkan-progres-perjanjian-dagang-ri-uni-eropa](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6821385/zulhas-beberkan-progres-perjanjian-dagang-ri-uni-eropa)
- Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daron Acemoğlu, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown.
- Dean Pruitt, d. C. (1993). *Negotiation in Social Conflict*. Pacific Grove.
- Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam. (2023, July 13). *The European Union and Indonesia*. Retrieved from [eeas.europa.eu: https://www.eeas.europa.eu/indonesia/european-union-and-indonesia_en?s=168](https://www.eeas.europa.eu/indonesia/european-union-and-indonesia_en?s=168)
- Devie. (2003). Mengkaji Peluang Pasar Internasional Melalui Kinerja Ekonomi Negara-Negara Uni Eropa. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 5, No. 1*, 1 - 16.
- Ditjen PPI. (2023, July 5). *Latar Belakang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Retrieved from [ditjenppi.kemendag.go.id: https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/eropa/uni-eropa](https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/eropa/uni-eropa)
- Ditjen PPI. (2023, July 5). *Manfaat Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Retrieved from [ditjenppi.kemendag.go.id: https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/eropa/uni-eropa](https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/eropa/uni-eropa)
- Eopmann, T. (1995). Two Paradigms of Negotiation: Bargaining and Problem Solving. In *Annals- American Academy Of Political and Social Science*, 542 ; 24-47 (pp. 25-26). Laxenburg: SAGE Periodicals Press.
- E-Procurement Indonesia. (2021, Juni 1). *Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa*. Retrieved from <https://eprocurement-indonesia.com/>: <https://eprocurement-indonesia.com/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa/>
- EU, D. o. (2011). *Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement*. 31.
- eur-lex.europa.eu. (2014). **DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC. Official Journal of the European Union**, 1.

- European Commission. (2023). *Report of the 13th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Bali: European Commission.
- European Commission. (2016). *Report of The 1st Round of Negotiations for A Free Trade Agreement Between European Union and Indonesia*. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2017). *Report of The 2nd Round of Negotiations for A Free Trade Agreement Between The European Union and Indonesia*. Bali: European Commission.
- European Commission. (2017). *Report of the 3rd round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2018). *Report of the 5th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2019). *Report of the 7th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2019). *Report of the 8th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Jakarta: European Commission.
- European Commission. (2019). *Report of the 9th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2020). *Report of the virtual round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. European Commission.
- European Commission. (2021). *Report of the 10th round of negotiations*. Digital: European Commission.
- European Commission. (2022). *Report of the 12th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. European Commission.
- European Commission. (2023, July 13). *Access2Markets: Positive and negative listing*. Retrieved from [trade.ec.europa.eu: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/positive-and-negative-listing](https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/positive-and-negative-listing)
- European Commission. (2023, July 5). *EU trade relations with Indonesia*. Retrieved from <https://policy.trade.ec.europa.eu/>: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia_en
- European Commission. (2023, July 5). *EU-Indonesia agreement: Documents*. Retrieved from [policy.trade.ec.europa.eu: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents_en)

- European Commission. (2023). *Report of the 14th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*. Brussels: European Commission.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Harvard. (2023, March 30). *Six Guidelines for "Getting to Yes"*. Retrieved from pon.harvard.edu: <https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/six-guidelines-for-getting-to-yes/>
- Hestuleksono, A. (2023, July 5). *Tinjauan Atas Kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Keikutsertaan Indonesia dalam Government Procurement Agreement (GPA)*. Retrieved from academia.edu: https://www.academia.edu/34662292/TINJAUAN_ATAS_KESIAPAN_KEMENTERIAN_PEKERJAAN_UMUM_DAN_PERUMAHAN_RAKYAT_TERKAIT_KEIKUTSERTAAN_INDONESIA_DALAM_GOVERNMENT_PROCUREMENT_AGREEMENT_GPA
- Huberman, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Humas Sekretariat Kabinet RI. (2023, July 13). *Pemerintah Dorong Penyelesaian Lima Isu Strategis dalam IEU-CEPA*. Retrieved from <https://setkab.go.id/>: <https://setkab.go.id/pemerintah-dorong-penyelesaian-lima-isu-strategis-dalam-ieu-cepa/>
- Indonesia Services Dialogue Council. (2020). *Kajian Potensi Pengadaan Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi dan Keinsinyuran di Bawah Skema I-EU CEPA*. Jakarta: Indonesia Services Dialogue Council.
- Indonesia, H. S. (2022, April 9). *Presiden Keluarkan Inpres Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/presiden-keluarkan-inpres-percepatan-peningkatan-penggunaan-produk-dalam-negeri-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>
- Indonesia, K. P. (2016, Desember 8). *Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terus Digencarkan*. Retrieved from [Kemenperin.go.id](https://kemenperin.go.id/): <https://kemenperin.go.id/artikel/16698/Peningkatan-Penggunaan-Produk-Dalam-Negeri-Terus-Digencarkan>
- Indonesia, T. B. (2007). *Kerjasama Perdagangan Internasional*. Elex Media Komputindo.
- Jack S, a. H. (1965). Bargaining and Negotiation in International Relations. In *International Behavior: A social Psychological Analysis* (p. 466). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- (n.d.). *Joint Scoping Paper for an EU – Indonesia Comprehensive Partnership Agreement*.
- Kemenkeu. (2010). *Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from jdih.kemenkeu.go.id: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/54TAHUN2010PERPRESPENJ.htm>

- Kemenkeu. (2013). *Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2*. Jakarta: BKF Kemenkeu.
- Kementerian Perdagangan RI. (2020). *Rapat Pleno Koordinasi Penyelesaian Isu Tertunda dalam Perjanjian IEU-CEPA*. Jakarta: KemendagRI.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023, July 5). *Wamendag pada ARISE+ Indonesia Programme Results Dissemination*. Retrieved from kemendag.go.id: <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/wamendag-pada-arise-indonesia-programme-results-dissemination>
- Kementerian PUPR. (2021, August 31). *Wujudkan Kebijakan Pengadaan bersifat Inklusif Melalui Pelatihan*. Retrieved from pu.go.id: <https://pu.go.id/berita/Wujudkan-Kebijakan-Pengadaan-bersifat-Inklusif-Melalui-Pelatihan>
- Kemlu. (2023, february 9). "Putaran ke-2 Perundingan I-EU-CEPA Tentukan Arah Strategis", <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Putaran-ke-2-Perundingan-I-EU-CEPA-Tentukan-Arah-Strategis.aspx>. Retrieved from kemlu.go.id: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Putaran-ke-2-Perundingan-I-EU-CEPA-Tentukan-Arah-Strategis.aspx>
- Komariah, D. S. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Konsultasi Publik Rancangan Peraturan LKPP tentang Pemilihan Penyedia*. (2021, March 25). Retrieved from lkpp.go.id: <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6049>
- Liang, M. (2006). Government Procurement at Gatt/WTO: 25 Years of Plurilateral Framework. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 278.
- Liputan6.com. (2019, November 20). *Pelatihan SDM Masuk Dalam Perjanjian Indonesia dan Eropa*. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4115171/pelatihan-sdm-masuk-dalam-perjanjian-indonesia-dan-eropa>
- LKPP. (2020, July 13). *Pengumuman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Melalui Video Conference*. Retrieved from lkpp.go.id: <https://lkpp.go.id/v3/#/read/5866>
- LKPP. (2021, July 22). *[Siaran Pers] Hingga 2024, Pemerintah Targetkan Anggaran Rp 17 Triliun untuk Belanja Produk TIK Dalam Negeri Dem*. Retrieved from lkpp.go.id: <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6162>
- Lumumba, P. (2013). *Negosiasi Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- McClelland, C. A. (1966). *Theory and the international system (Government in the modern world series)*. Collier-Macmillan.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nye, J. S. (1990). Soft Power. *Foreign Policy No. 80, Twentieth Anniversary*, 153-171.

- Perindustrian, P. P. (2020). *Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)*. Jakarta: Kemenperin.
- Perrotta, C. (2014, January). Thomas Mun's England's Treasure by Forraign Trade : the 17th -Century Manifesto for Economic Development. pp. 96-100.
- Poppy Sulistyaning Winanti, R. A. (2018). *Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam GPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri*. Jakarta: LKPP.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. R. (2023, July 5). *Dinamika Hubungan Ekonomi-Politik Indonesia-Uni Eropa*. Retrieved from repository.umy.ac.id: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/983>
- Roger Fisher, W. U. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In; The Second Edition*. New York: Penguin Group.
- Rusman, B. S. (2019, November 6). *Presiden Republik Indonesia*. Retrieved from presidenri.go.id: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-harus-majukan-industri-dalam-negeri/>
- Schwab, P. K. (2019). *The Global Competitiveness Report*. Cologny: World Economic Forum.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siska Yuli Anita, d. (2022). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sood, M. (2012). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Spechler, M. J. (1990). *Perspectives in Economic Thought*. India University.
- Statista. (2023, July 13). *Gross domestic product at current market prices of selected European countries in 2022*. Retrieved from Statista.com: <https://www.statista.com/statistics/685925/gdp-of-european-countries/#:~:text=GDP%20of%20European%20countries%20in%202022&text=With%20a%20Gross%20Domestic%20Product,followed%20by%20Italy%20and%20Spain.>
- Stein, J. G. (1988). International Negotiation: A Multidisciplinary Perspective. *Negotiation Journal*, 221.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2008). *Makro Ekonomi: Teori Penganta*. Raja Grafindo Persada.

- Sutarto, T. (2023, Juli 10). Wawancara Negosiator IEU CEPA on GP Chapter. (S. Fakhirah, Interviewer)
- Syukri, H. A. (2021). Perbedaan Pengaturan antara Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement Chapter dengan Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 86.
- Syukri, P. A. (2020). Implikasi Prinsip Non-Diskriminasi Draft Text of Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government uu Procurement Chapter Terhadap Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia. *Transnational Business Law Journal Vol. 1, No. 2*.
- The European External Action Service (EEAS). (2023). *European Union Trade and Investment with Indonesia 2022/2023*. The European External Action Service (EEAS).
- Wen, S. (2020). *POLI 330 International Organization*. University of South Carolina.
- Wisevoter. (2023, 7 13). *Largest Economies in the World*. Retrieved from wisevoter.com: <https://wisevoter.com/country-rankings/largest-economies-in-the-world/>
- World Bank. (2023, 7 13). *GDP (current US\$) - European Union*. Retrieved from data.worldbank.org: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2022&locations=EU&start=1970&view=chart>
- WTO. (2023, July 5). *Basic principles and elements of WTO GPA*. Retrieved from www.wto.org: https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gpa_1994_e.htm
- WTO. (2023, July 5). *General overview of WTO work on government procurement*. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/overview_e.htm
- WTO. (2023, January 26). *WTO and government procurement*. Retrieved from wto.org: https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
- Yudhoyono, D. H. (2010, Agustus 6). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from jdih.kemenkeu.go.id: <http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/54TAHUN2010PERPRES.HTM#:~:text=Pengadaan%20Barang%20Jasa%20Pemerintah%20yang%20selanjutnya%20di%20sebut%20dengan%20Pengadaan%20Barang,seluruh%20kegiatan%20untuk%20memperoleh%20Barang%20>
- Zerbe, N. (Director). (2021). *Two Level Games and International Diplomacy* [Motion Picture].